

PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP), SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGALAMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Maluku)

Meny Huliselan

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon
huliselanmeny@gmail.com

Abstract

The purpose of the study is to find out empirically the effect of understanding government accounting standards, regional financial accounting systems, experience in managing regional property on the quality of regional financial reports. This research is stand as empirical research by used purposive sampling as sampling technique. The survey method was used in data collection and hypothesis testing through t-statistical test with a significance level of 0.05. The results of the study prove that the understanding of government accounting standards has a significant positive effect on the quality of financial statements, the regional financial accounting system has a significant positive effect on the quality of financial reports, but the experience of managing regional property has no significant effect on the quality of the financial statements of the Maluku Provincial Government.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris pengaruh pemahaman Standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, pengalaman pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Tipe penelitian adalah hubungan kausal atau hubungan antar variabel dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Metode survey digunakan dalam pengumpulan data dan pengujian hipotesis melalui uji t-statistik dengan derajat signifikansi adalah 0,05. Hasil penelitian membuktikan pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, namun pengalaman pengelolaan barang milik daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Negara. Kualitas Laporan Keuangan.

1. PENDAHULUAN

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Berbagai temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menilai laporan keuangan pemerintah daerah banyak yang bermasalah bahkan tidak layak audit. Permasalahan yang ditemukan diantaranya terkait ketidakjelasan penyimpanan dana daerah dan penggunaan keuangan daerah dengan boros yang tidak jelas keperluannya. Disamping itu, akuntabilitas transparansi laporan keuangan Pemerintah daerah masih sangat rendah.

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data yang sesuai dengan peraturan serta masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan

pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Diberlakukannya PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pegawai pada semua instansi harus memiliki pemahaman yang baik mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual sehingga menghasilkan laporan keuangan berkualitas baik. Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum. Untuk itu, pemahaman aparatur pemerintah terhadap berbagai ketentuan yang diisyaratkan dalam standar dimaksud dalam penyusunan laporan keuangan.bPemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ini sangat diperlukan supaya hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

Faktor lain yang berimplikasi pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah

diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, efisien dan efektif. Untuk dapat menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah secara baik harus dipenuhi beberapa hal yang merupakan syarat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Dengan demikian, dalam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan baik pihak intern maupun pihak ekstern Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Prosedur yang dimaksud yaitu dimulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ini, harus berdasarkan pada standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual yaitu dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Menurut Ahyani (2007) yang dikutip oleh Halim dan Kusufi (2012) mengungkapkan bahwa penerapan basis akrual memberikan hasil yang lebih baik dan memberikan keuntungan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dalam rangka akuntabilitas publik.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2020, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Provinsi Maluku mendapat opini Wajar Tanpa Dengan Pengecualian (WTP). Opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut sama dengan yang diberikan terhadap laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP) mengandung arti bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar. Namun masih ditemukan adanya pembatasan lingkup dan kesalahan penyajian material pada akun peralatan dan mesin serta akun jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan dalam neraca namun belum didukung dengan data dan informasi yang lengkap. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah yang baik haruslah menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Maluku.

Sutaryo (2010) menyatakan bahwa pengelolaan aset daerah bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Petugas pengelola barang milik daerah haruslah piawai dalam mengelola aset daerah sesuai dengan standar serta haruslah memiliki kompetensi yang ditunjang dengan pengalamannya dalam mengelola aset daerah sehingga menghasilkan

kualitas laporan barang milik daerah pada khususnya dan Laporan Keuangan memadai.

Berbagai permasalahan terhadap akun aset tetap yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai, saldo aset tetap tidak dapat ditelusur, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, aset tetap dikuasai pihak lain; aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain. Beberapa permasalahan ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkan aset tetapnya tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu permasalahan ini juga berpotensi menimbulkan kerugian daerah.

Beberapa faktor penting yang dapat menunjang kualitas pelaporan keuangan daerah adalah pemahaman dan penerapan standar akuntansi pemerintahan secara baik. Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Faktor lain adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif, serta penempatan aparatur yang memiliki pengalaman terhadap pengelolaan barang milik daerah. Hal ini untuk mengurangi kesalahan penyajian material terhadap aset tetap pemerintah.

2. KAJIAN TEORI

Hubungan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Salah satu bentuk kebijakan Direktorat Sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan, karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi yang disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah ia mengerti dan memahami bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, maka perlu diperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, dalam memahami berbagai ketentuan dalam standar dimaksud. Pemahaman terhadap SAP ini diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan) (Nasrudin, 2008). Sari, dkk (2014) meneliti tentang pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Pemerintah Kabupaten Jembrana menemukan bahwa, setiap dilakukan peningkatan pemahaman

standar akuntansi pemerintahan (SAP) kepada aparat pemerintah khususnya pada pegawai pengelola keuangan, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian Kusumah (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Tasikmalaya. Demikian juga hasil penelitian Nugraheni dan Subaweh (2018) yang menunjukkan terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Dari uraian di atas, maka hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini adalah:

H1: Pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Permendagri Nomor 13, 2006; 16-17) adalah sebagai berikut. :

- a. Tertib. Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Taat pada peraturan perundang-undangan. Taat adalah pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. Efektif. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- d. Efisien. Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- e. Ekonomis. Ekonomis adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- f. Transparan. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- g. Bertanggung jawab. Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- h. Keadilan. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

i. Kepatutan. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional.

j. Manfaat untuk masyarakat. Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, tujuan pelaporan keuangan pemerintah dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah (2000: 11) adalah:

- a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik;
- b. Manajerial informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana.
- c. Transparansi Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih dan Triantoro (2011) menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan meningkatkan sistem pengendalian intern yang lebih baik. Penelitian dari bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif ditunjang dengan sistem pengendalian intern yang baik dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian Patra, Bustami dan Hasriani (2015) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Dewi, Sinarwati dan Darmawan (2014) menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah;

H2 : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Pengelolaan Barang Mulik Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Anwar Nasution (2008), pengelolaan aset barang dan tanah yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dinilai masih kurang tertib. Hal ini terlihat dari pencacatan dan bukti hak aset-aset tersebut. Kurang tertibnya pencatatan berdampak pada kewajaran pelaporan aset dalam laporan keuangan pemerintah, rawan terhadap penyalahgunaan, dan rawan pengakuan aset oleh pihak lain yang kemudian menjadi sengketa.

Menurut Ningsih (2011) menyatakan bahwa semakin baik inventarisasi barang milik daerah (BMD) dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemda juga harus serius mengelola aset dengan mempelajari manajemen aset. Apalagi, manajemen aset terkait dengan bagaimana cara mengelola aktiva tetap, agar aktiva tetap tersebut terinventarisir, ternilai, tersajikan, serta terungkap dan memadai sesuai dengan undang-undang.

Pengelolaan barang milik daerah adalah bagian dari suatu sistem. Menurut Ningsih (2011), sistem ini direncanakan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak luar maupun dalam organisasi. Sejalan dengan pengertian tersebut, pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai keadaan barang milik daerah disuatu wilayah. Jika penyajian informasi dalam pengelolaan barang milik daerah tersebut memadai, maka informasi tersebut berkualitas.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Wilkinson et.al. (2000) yakni bahwa informasi yang berkualitas dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula. Diperkuat dengan pendapat M.Yusuf (2010) yakni pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah;

H3 : Pengelolaan barang milik daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. METODOLOGI

Desain Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti secara langsung mencari data yang diperlukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada responden yang menjadi sampel. Disamping itu tipe penelitian ini adalah penelitian dasar karena penelitian ini menguji teori yang sudah ada sebelumnya untuk menghasilkan suatu pengetahuan tentang bagaimana memecahkan masalah yang dapat terjadi dalam organisasi.

Jenis penelitian adalah pengujian hipotesis (*hypothesis testing*), yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan

antar variabel (*causal research*). Jenis data dalam penelitian ini adalah data subyek yaitu data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden).

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.

Populasi merupakan kelompok orang, kejadian atau peristiwa yang menjadi perhatian para peneliti untuk diteliti (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur (pengawai negeri sipil) di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang terdiri dari 60 OPD.

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara purposive sampling. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti.

Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- a. Pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan di masing-masing OPD.
- b. Memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan

Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sugiyono, 2017). Variabel *dependent* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Halim (2004), laporan Keuangan Daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan yaitu; Aktivitas keuangan di masa lalu, memprediksi masa yang akan datang, ketepatanwaktuan penyajian, pengambilan keputusan, disajikan wajar dan jujur, informasi dapat dibandingkan, informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami dan sesuai SAP

Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel *independent* adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat secara positif atau negatif (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini yang menjadi variabel *independent* adalah

1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sehingga Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Indikator pengukuran variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu ; Pengakuan pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan financial, informasi mengenai posisi dan perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas, informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya, informasi dan cara entitas pelaporan mendanai aktifitasnya dan memenuhi kebutuhan kas, informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pemahaman tentang Aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi dan emahaman tentang laporan operasional.

2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan secara sederhana adalah suatu sistem informasi yang menggabungkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepe ntingan.

Indikator pengukuran variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu; Kesesuaian sistem dengan SAP, pengidentifikasian transaksi, pencatatan transaksi, bukti disetiap transaksi, pencatatan kronologis, pengklasifikasian transaksi, laporan keuangan setiap periodeda pelaporan yang konsisten dan periodik.

3. Pengalaman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengalaman kerja dapat meningkatkan keterampilan dalam bekerjakarena dengan pekerjaan yang dilakukannya secara berulang-ulang tentunya dapat menambah pengetahuan dan mendapatkan cara yang terbaik, efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya, selain itu seseorang yang memiliki pengalaman tentunya memiliki cara berfikir yang lebih terperinci dan lengkap jika dibanding dengan seseorang yang belum memiliki pengalaman. Pengalaman dalam mengelola aset akan semakin berkembang dengan bertambahnya pengalaman, diskusi mengenai pengelolaan barang milik negara dengan rekan sekerja, pengawasan dan review oleh inspektorat, mengikuti program pelatihan dan pedoman pengelolaan barang milik negara.

Indikator dalam mengukur pengalaman pengelolaan barang milik negara yaitu sebagai berikut; Lama bekerja, kompleksitas masalah/persoalan, kontinyuitas pekerjaan. Dan umlah Pekerjaan yang dikerjakan.

Masing-masing variabel diukur dengan model skala Likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-Ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Responden diminta untuk

menyatakan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadapa pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya. Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang mempunyai selisih sama antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Data yang diperoleh dari skala Likert adalah berupa data interval, karena skala Likert menggunakan lima angka penilaian, yaitu skor 1 untuk pernyataan sangat tidak setuju, skor 2 untuk pernyataan tidak setuju, skor 3 untuk pernyataan netral, skor 4 untuk pernyataan setuju, dan skor 5 untuk pernyataan sangat setuju

Teknik Analisis Data

Pengujian Kualitas Data

Pengujian kualitas data dilakukan untuk mengetahui kebenaran jawaban responden. Uji ini dilakukan melalui validitas data dan reliabilitas.

Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan karena alat analisis yang digunakan adalah regresi. Syarat regresi yang baik harus melewati pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dengan tujuan untuk memenuhi syarat normalitas, bebas multikolonieritas dan bebas heteroskedastisitas.

Pengujian Moderate Regression Analysis (MRA)

Persamaan *Moderate Regression Analysis* berikut:

$$KLKP = \beta_0 + \beta_1SAP + \beta_2SAKD + \beta_3PPBN + e$$

4. PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Validitas dan Relibilitas

Tabel 3, Pengujian Validitas Data

Variabel	Nilai Person Correlation	Tingkat Sig.
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah	0,80** - 0,92**	0,00
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,83** - 0,95**	0,00
Pengalaman Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,72** - 0,90**	0,00
Kualitas Laporan Keuangan	0,74** - 0,89**	0,00

Sumber: data primer diolah tahun 2022

Nilai pada tabel di atas menunjukkan hasil *person correlation* variabel > 0,30 serta tingkat signifikan < 0,01. Disimpulkan, data penelitian valid, Ghozali (2016).

Hasil Pengujian Reliabilitas Data

Tabel 4. Hasil Pengujian Reliabilitas Data

Variabel	Hasil Cronbach Alpha
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah	0,96

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,98
Pengalaman Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,94
Kualitas Laporan Keuangan	0,95

Sumber: data primer diolah tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan nilai *cronbach alpha* variabel penelitian lebih besar dari batas minimal 0,60. Disimpulkan, indikator-indikator variabel penelitian dikategorikan reliabel atau handal.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik
Hasil Pengujian Normalitas Data

Tabel 5. Penhujian Normalitas

Variabel	Kolmogorov Smirnov	p-Value	Sig
Unstandardized Residual	8,12	0,52	$p > 0,05$

Sumber: data primer diolah tahun 2022

Data di atas menunjukkan nilai *kormogolov smirnov* adalah 8,12 serta tingkat signifikan adalah 0,52 yang lebih besar dari 0,05. Disimpulkan, data terdistribusi secara normal.

Hasil Pengujian Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Pengujian Multikolinearitas

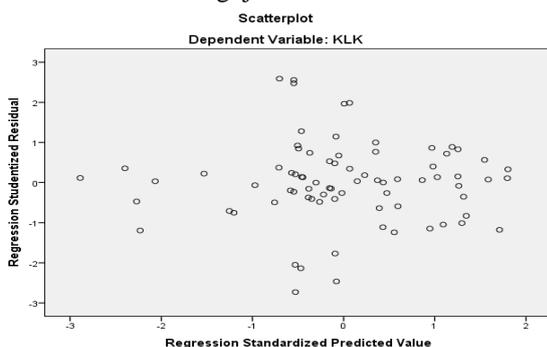
Variabel Independen	Tolerance	VIF
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah	0,96	1,03
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,94	1,06
Pengalaman Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,97	1,03

Sumber: data primer diolah tahun 2022

Data di atas memperlihatkan nilai *tolerance* variabel independen $< 0,1$. Artinya, bebas korelasi antar variabel independen. Selanjutnya nilai *variance inflantion factor* (VIF) variabel independen > 10 . Disimpulkan, bebas dari multikolinearitas.

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Gambar 1. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas



Sumber: data primer diolah tahun 2022

Hasil pengujian heteroskedastisitas di atas menunjukkan pola yang jelas, dengan titik-titik data

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Disimpulkan, tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 7. Pengujian F-Statistik, Uji-t Statistik, Uji Determinansi (R^2)

Variabel	Koe-Fisien	t	p-value
(Constant)	6,90	1,46	0,14
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah	0,33	3,98	0,00
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,30	5,27	0,00
Pengalaman Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,16	1,88	0,06
R Square	0,45		
Adjusted R Square	0,43		
F Model	20,19		
Sig	0,00		

Sumber: data primer diolah tahun 2022

Hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel diatas menunjukkan, besarnya nilai adjusted r square adalah sebesar 0,43 atau sekitar 43%. Hal ini memberi arti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 43% sedangkan sisanya 57% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Hasil uji f model pada tabel di atas menunjukkan, nilai F-hitung adalah sebesar 20,19 dengan tingkat probabilitas signifikan sebesar 0,00 (0%). Nilai probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen pemahaman standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengalaman pengelolaan barang milik daerah terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan.

Pengujian hipotesis 1: "Pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku". Hasil pengujian menunjukkan variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah berhubungan positif 3,98 dengan nilai probabilitas 0,00 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

Pengujian hipotesis 2: "Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku". Hasil pengujian menunjukkan variabel sistem akuntansi keuangan daerah berhubungan positif 5,27 dengan nilai

probabilitas 0,00 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

Hasil pengujian hipotesis 3: "Pengalaman pengelolaan barang milik daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku". Hasil pengujian menunjukkan variabel pengalaman pengelolaan barang milik daerah berdasarkan hasil pengujian berhubungan positif 1,88 dengan nilai probabilitas 0,06 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif namun tidak signifikan pengalaman pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini ditolak.

Pembahasan Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Hipotesis pertama yang diusulkan adalah pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan melalui uji t - statistik menunjukkan variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah berhubungan positif 3,98 dengan nilai probabilitas 0,00 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

Hubungan positif pemahaman standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan memiliki makna bahwa kedua variabel ini searah. Artinya, semakin baik pemahaman aparatur tentang standar akuntansi pemerintah, akan berdampak pada semakin pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sebaliknya jika semakin kurang pemahaman aparatur tentang standar akuntansi pemerintah, akan berdampak pada semakin menurun kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh aparatur. Disamping itu, pengaruh signifikan antara pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan pemahaman atas standar akuntansi pemerintah berpengaruh besar terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam kamus psikologi, kata pemahaman berasal dari kata *insight* yang mempunyai arti

wawasan, pengertian dan pengetahuan yang mendalam. Jadi, arti dari insight adalah suatu pemahaman atau penilaian yang beralasan mengenai reaksi-reaksi pengetahuan atau kecerdasan dan kemampuan yang dimiliki seseorang. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pemahaman merupakan kemampuan diri dalam mengerti atau mengetahui dengan benar terhadap sesuatu. Begitu halnya dengan pemahaman atas standar akuntansi pemerintahan (SAP), berarti kemampuan diri dalam mengerti atau mengetahui dengan benar terhadap sesuatu (SAP), mempunyai wawasan dan pengertian pengetahuan yang mendalam mengenai standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Aparatur di pemerintah Provinsi Maluku, khususnya pegawai pengelola keuangan telah memiliki wawasan dan pengertian pengetahuan yang mendalam mengenai standar akuntansi pemerintahan (SAP). Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis deskriptif statistik, dimana rata-rata aktual variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah untuk seluruh responden lebih tinggi daripada rata-rata teoritisnya. Hasil ini mengindikasikan bahwa aparatur pada Pemerintah Provinsi Maluku cenderung memiliki pemahaman atas standar dimaksud tinggi. Hal ini akan berdampak kepada semakin baik pula kualitas audit auditor pada kedua kabupaten dimaksud.

Menurut teori keagenan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban agen kepada prinsipal atas pengelolaan keuangan daerah yang dibuat sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Semakin menguatnya tuntutan terhadap lembaga-lembaga publik untuk mewujudkan akuntabilitas sektor publik, mengharuskan pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas suatu laporan keuangan, haruslah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Ketika aparatur memiliki pemahaman atas standar dimaksud baik, laporan keuangan yang dibuat pun akan baik yang berdampak kepada laporan keuangan yang dihasilkan semakin berkualitas.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Sari, Adiputra dan Sujana (2014). Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Safrida Yuliani, Nadirsyah, dan Usman Bakar (2010) yang menyatakan bahwa seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sekarang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga pemahaman Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Permana (2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas. Namun demikian, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rajana (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman SAP memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap keberhasilan penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Hipotesis kedua yang diajukan adalah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel sistem akuntansi keuangan daerah berhubungan positif 5,27 dengan nilai probabilitas 0,00 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

Hasil menunjukkan adanya hubungan positif antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti, sistem akuntansi keuangan daerah searah dengan kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, sistem akuntansi keuangan daerah di aplikasikan dengan baik akan berdampak terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Sebaliknya, sistem akuntansi keuangan daerah di aplikasikan dengan kurang baik, maka berimplikasi terhadap semakin rendah kualitas laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya, pengaruh yang signifikan antara keduanya menunjukkan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemahaman pegawai terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sangatlah diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi, mulai dari sistem pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam

pengambilan keputusan. Jika hal tersebut telah dilakukan dengan baik, maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pun semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan teori yang diajukan oleh Mardiasmo (2004) yang mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Hasil analisis deskriptif statistik, rata-rata aktual atas jawaban responden adalah sebesar 52,32. Jika dihubungkan dengan banyaknya indikator pengukuran variabel yang sebanyak 13 pernyataan, maka responden lebih banyak menentukan pilihan setuju atas semua pernyataan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah. Pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: "penerimaan langsung disetor ke kas daerah, anggaran belanja ditentukan tidak melebihi batas tertinggi, SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan selain dari yang telah ditetapkan dalam APBD, pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah, pendapatan didukung dengan bukti, pengembalian kelebihan pendapatan dibebankan pada belanja tidak terduga dengan didukung bukti yang lengkap dan sah, setiap bukti pengeluaran belanja atas beban APBD mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja dan pembentukan dana cadangan dalam rekening tersendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa telah mengaplikasikan dengan baik sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan pun akan semakin berkualitas.

Konsep akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dijelaskan dalam agency theory, dimana kewajiban pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban keuangan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Pemerintah sebagai pemegang amanah haruslah memberdayakan aparturnya untuk berupaya meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan daerah. Keinginan principal akan terpenuhi sistem akuntansi keuangan daerah dijalankan dengan baik oleh aparat pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatra, dkk (2015) yang

menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Ifa Ratifah dan Mochammad Ridwan (2012) juga menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan penelitian ini menginformasikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tutun Hermawanto Botutihe (2013). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi Roviyantje (2011) juga menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain yang mendukung hasil ini yaitu Sari, Adiputra dan Sujana (2014) yang menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Pengaruh Pengalaman Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah pengalaman pengelolaan barang milik daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Hasil pengujian hipotesis melalui uji t statistik menunjukkan variabel pengalaman pengelolaan barang milik daerah berdasarkan hasil pengujian berhubungan positif 1,88 dengan nilai probabilitas 0,06 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif namun tidak signifikan pengalaman pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini ditolak.

Hasil menunjukkan adanya hubunyan yang positif antara pengalaman pengelolaan barang milik daerah dengan kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut searah dengan pengertian, aparatur dengan pengalaman tinggi mengenai pengelolaan barang milik daerah akan berdampak terhadap semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkannya. Sebaliknya, aparatur dengan pengalaman yang kurang mengenai pengelolaan barang milik daerah akan berdampak terhadap semakin menurun pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkannya. Selanjutnya, pengaruh yang tidak signifikan menunjukkan bahwa pengalaman pengelolaan

barang milik daerah tidak berpengaruh besar kualitas laporan keuangan.

Pengalaman kerja dapat meningkatkan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya, karena dengan pekerjaan yang dilakukannya secara berulang-ulang tentunya dapat menambah pengetahuan serta mendapatkan cara yang terbaik, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas. Selain itu, seseorang yang memiliki pengalaman tentunya memiliki cara berfikir yang lebih terperinci dan lengkap jika dibanding dengan seseorang yang belum memiliki pengalaman. Berdasar pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman dapat meningkatkan kematangan seseorang, dalam arti ia dapat memperoleh pelajaran dari apa yang telah dilakukannya sebelumnya sehingga hal ini akan mendorongnya bekerja secara lebih efektif dan efisien. Pengalaman dalam mengelola aset akan semakin berkembang melalui lama bekerja dalam pengelolaan aset daerah, diskusi mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan rekan sekerja, pengawasan dan review oleh inspektorat maupun mengikuti program pelatihan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah.

Pengelolaan barang milik daerah bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Petugas pengelola barang milik daerah haruslah piawai dalam mengelola aset daerah sesuai dengan standar serta harus memiliki kompetensi yang ditunjang dengan pengalamannya dalam mengelola aset daerah sehingga menghasilkan kualitas laporan barang milik daerah pada khususnya dan laporan keuangan yang memadai. Berbagai permasalahan mengenai aset daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku seperti saldo aset tetap yang tidak dapat ditelusuri, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, aset tetap dikuasai pihak lain, aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain.

Permasalahan mengenai aset daerah ini disebabkan karena aparatur pemerintah yang ditugaskan masih minim pengalaman dalam hal pengelolaan aset daerah. Disamping itu, berbagai kondisi seperti; informasi yang relevan untuk membuat laporan BMD setiap semester/tahunan belum diketahui secara lengkap oleh aparatur, kompleksitas tugas yang dirasakan kurang sehingga tidak memicu aparatur untuk berkembang atau belajar dari kesalahan yang dilakukan sebelumnya, penyelesaian berbagai tugas dalam mengelola aset daerah masih terasa kurang, serta minimnya diskusi-diskusi internal antara aparatur berhubungan dengan pengelolaan aset daerah. Hal ini secara langsung berdampak kepada pertanggungjawaban aset daerah dalam laporan keuangan memberikan informasi yang rancu bagi pengguna laporan keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan tugas pemerintah daerah yang akan dipertanggungjawabkan ke publik. Seperti yang dijelaskan dalam agency theory, kewajiban pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah sebagai agen untuk memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada pihak pemberi amanah atau principal yang dalam hal ini masyarakat. Namun disisi lain, adanya perbedaan kepentingan antara para manajemen dan para stakeholder yang menyebabkan adanya konflik dimana pihak manajemen yaitu pemerintah daerah cenderung menginginkan keuntungan pribadi yang mengakibatkan dana yang diperoleh dari pemerintah mudah disalahgunakan. Salah satu bentuknya yaitu dalam pengelolaan barang milik daerah masih terdapat keadaan dimana saldo aset daerah tidak sesuai atau pun keberadaannya tidak dapat diketahui serta hal lainnya. Hal ini akan mengurangi kualitas pelaporan keuangan pemerintah yang disajikan atau dilaporkan.

Hasil ini mendukung penelitian bertolak belakang dengan penelitian Rifa'i (2014). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengalaman dalam mengelola aset berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya, penelitian Sofyan (2012) juga bertolak belakang dengan hasil ini, dimana penelitiannya menyimpulkan bahwa pengalaman pengelolaan barang milik daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lain yang bertolak belakang dengan hasil ini yaitu Poedjodarmo (2016). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil pengujian terhadap tanggapan 96 responden memberikan kesimpulan penelitian ini antara lain: Pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Pengalaman pengelolaan barang milik daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 1,88 dengan nilai signifikansi 0,06 lebih dari 0,05 ($P > 0,05$) serta koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,16. Pengalaman pengelolaan barang milik daerah tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Saran

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah dengan upaya

peningkatan kompetensi atau pemahaman aparaturnya terhadap standar akuntansi pemerintah yang berbasis aktual. Karena dengan memahami dengan baik standar dimaksud, maka penyusunan laporan keuangan akan menjadi lebih baik. Disamping itu, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Pemahaman pegawai terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sangatlah diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga proses yang dimulai dari sistem pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan dapat menghasilkan informasi keuangan yang baik. Hal lain adalah pegawai pemerintah yang ditugaskan dalam mengelola barang milik daerah haruslah yang memiliki pengalaman, sehingga pengelolaannya pun dapat dilakukan dengan baik.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat digeneralisir ke semua objek, perlu dilakukan penelitian yang lebih luas pada beberapa kabupaten/kota yang ada di provinsi Maluku.

Variabel independen yang diteliti berpengaruh terhadap variabel kualitas audit sebesar 43%, berarti bahwa ada pengaruh sebesar 56,7% dari variabel-variabel lain di luar model. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam model regresi pada penelitian ini, seperti kompetensi, pelatihan, sistem akuntansi instansi dan lain sebagainya..

DAFTAR PUSTAKA

- Fatra, Bustami dan Hasriani. 2015. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu*. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 02 No. 01 Halaman 1-9 Februari 2015.
- Halim dan Kusyufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdullah. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Kusumah, 2012. *Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya)*.
- Nugraheni dan Subaweh, 2018. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. *Jurnal Ekonomi Bisnis* No. 1 Vol. 13, April 2018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*

- Permana, Irvan. 2011. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Survei Pada Dinas Kota Bandung. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Poae, Ilat dan Warongan. 2016. *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud*. Penelitian Publikasi Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Rajana, Junita Putri. 2014. Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan, dan Pelatihan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematang Siantar. Universitas Sumatera Utara
- Rifa'i. Aditya Bachtiar 2014. *Pengaruh Etika Kompetensi, dan Pengalaman Pengelolaan Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. (Survai Pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jogjakarta.
- Syofyan, Anshari, Efrizal, 2012. *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas*
- Sari. 2014. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju AkruaL Di Jombang*.
- Sari, Adiputra, dan Sujana. 2014. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana*. *Jurnal Jurusan Akuntansi* (Volume 2 No. 1 Tahun 2014). Universitas Pendidikan Ganesha
- Sutaryo, *Paper Manajemen Aset Daerah tahun 2010*.
- Widyaningsih, Wiyantoro Lili Sugeng 2011. *Hubungan Efektifitas System Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern Dengan Kualitas Kkuntabilitas Keuangan Kualitas Informasi Laporan Keuanga Sebagai Variabel Intervening*. SNA XIV Aceh 2011